

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik identitas adalah praktik menggunakan identitas anda sendiri sebagai cara untuk membela hak-hak orang lain yang memiliki identitas yang sama. Ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki kepentingan khusus untuk melindungi komunitasnya sendiri, dan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama untuk mendukung kepentingan orang-orang dengan identitas yang sama. Secara teoritis, inilah yang seharusnya dilakukan oleh politik identitas menekankan kesamaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk menciptakan gerakan yang lebih kuat dan bersatu. Namun dalam prakteknya, ini adalah cara untuk terus memperjuangkan hak-hak orang yang sudah memiliki banyak kekuasaan.

Di Indonesia politik identitas bukan merupakan suatu hal yang tabu lagi untuk dibicarakan dalam kehidupan sosial politik masyarakatnya. Indonesia merupakan negara yang multikultural, karena didukung oleh letak geografis Indonesia yang tersebar di pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia kaya akan keragaman Etnis budaya. Salah satu daerah di Indonesia yang multiEtnis berada di Kabupaten Langkat bagian Indonesia Barat tepatnya di pulau Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Suku di Kabupaten Langkat

No	Suku	Persentase
1	Jawa	56,87%
2	Melayu	14,93%
3	Karo	10,22%
4	Batak	4,76%
5	Madina	2,54%
6	Lainnya	10,94%

Sumber: BPS Kabupaten Langkat (2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten Langkat memiliki berbagai macam suku, namun didominasi oleh Jawa. Menurut Data Sensus Penduduk Kabupaten Langkat memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai Suku dan yang menjadi mayoritas adalah Suku Jawa sebesar 56,87%, disusul oleh Suku Melayu sebesar 14,93%, kemudian ada Suku Karo sebanyak 10,22%, Suku Batak yang tergabung didalamnya Batak Tapanuli, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak sebesar 4,76%, kemudian Suku Madina sebanyak 2,54% dan lainnya sebesar 10,94% (BPS Kabupaten Langkat 2023).

Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2024. Pesta demokrasi dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung para calon pemimpin. Pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 14 Februari 2024.

Pada saat menjelang pemilu politik identitas di kerap muncul di Kabupaten Langkat seperti pada tahun sebelumnya mengemuka politisasi identitas pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang biasa disebut dengan (DPRD) Kabupaten Langkat Tahun 2019 dengan menggunakan jargon-jargon kampanyenya dengan menggunakan bahasa Jawa dan Batak, karena mayoritas penduduk di Kabupaten Langkat adalah bersuku Jawa dan Batak. Setiap kandidat berlomba-lomba untuk dapat menarik simpati dari pemilih dengan menggunakan bahasa Jawa dan Batak, tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk mengenalnya, selain itu juga terdapat politisasi agama dan politisasi wilayah. Politisasi identitas dengan mengedepankan penggunaan bahasa Jawa bukan hanya dilakukan oleh calon yang memang orang keturunan Jawa asli, penggunaan bahasa Jawa juga dipakai oleh calon dari non Jawa namun dalam kampanye politiknya menggunakan bahasa Jawa.

Etnis menjadi isu yang hangat dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Langkat 2019 karena ada keyakinan dibenak para kandidat atau tim suksesnya bahwa cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara

membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya seperti suku, agama, ras dan golongan atau komunitas diantara semua identitas ini, etnis agama dan ras menjadi identitas yang paling kuat sehingga mudah menyulut emosi dan dapat dimobilisasi, dari sini dapat dilihat bahwa politik identitas mengalami transformasi pemaknaan identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang membuatnya, bukan untuk kepentingan identitas sendiri. Segala elemen-elemen etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan menghegemoni masyarakat elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting dan tertinggal tetapi justru menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan.

Anomali demokrasi dapat menghilangkan sisi keadilan di masyarakat yang berujung pada kecurangan dalam pemilihan umum. Haus akan jabatan menyebabkan calon banyak melakukan manipulasi demokrasi untuk memenangkan kontestasi pemilu. Penggunaan isu-isu yang berafiliasi dengan SARA telah mengakar menjelang pemilu. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi anomali demokrasi yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Penguatan isu SARA pada saat menjelang pemilu seperti saat ini menjadi ancaman untuk demokrasi.

Pada realitasnya politik identitas tidak bisa dilepaskan dari dunia perpolitikan terutama pada masa menjelang pemilu seperti saat ini yang digunakan sebagai cara untuk menarik suara pemilih. Adanya riwayat politik identitas sebelumnya di Kabupaten Langkat berpotensi akan muncul kembali pada saat menjelang pemilu serentak tahun 2024. Politik identitas pada akhirnya merupakan fenomena yang sangat kompleks karena terkait dengan kepentingan politik sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik mengambil judul penelitian "Politik Identitas Dalam Anomali Demokrasi: Mendekonstruksi SARA Dalam Perpolitikan Di Langkat Menuju Pemilu serentak 2024

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Isu SARA dalam perpolitikan di Kabupaten Langkat menjelang pemilu serentak 2024?
2. Apa dampak dari penggunaan politik identitas berbasis SARA menjelang proses pemilihan umum serentak di Langkat?
3. Bagaimana Mendekonstruksi SARA dalam perpolitikan di Langkat menjelang pemilu di Langkat?

1.3 Fokus Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada di atas, untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini perlu ditetapkan fokus penelitian, agar diperoleh informasi dan data yang jelas terhadap aspek-aspek yang harus diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Analisis isu SARA dalam perpolitikan di Kabupaten Langkat menjelang pemilu serentak 2024.
2. Analisis dampak dari penggunaan politik identitas berbasis SARA menjelang proses pemilihan umum serentak di Langkat.
3. Analisis mendekonstruksi Sara dalam perpolitikan di Langkat menuju pemilu serentak 2024

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan apa yang sebenarnya dicari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji isu SARA dalam perpolitikan di Kabupaten Langkat menjelang pemilu serentak.
2. Untuk menganalisis dampak politik identitas berbasis SARA menjelang proses pemilihan umum serentak di Langkat.
3. Untuk mengetahui dan mendekonstruksi isu SARA di Langkat

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian proposal ini maka manfaat dari penelitian ini adalah berdasarkan:

1. Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk lebih menyempurnakan penelitian yang sama.
2. Menjadi sumber informasi bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana dinamika politik identitas dalam anomali demokrasi yang berfokus pada isu SARA menjelang pemilihan umum serentak.

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumber informasi bagi penulis untuk mengetahui dinamika politik identitas dalam konteks SARA yang terjadi menjelang pemilihan umum di Langkat.
2. Memberikan sumber informasi dan menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui teori dan praktik dilapangan tentang politik identitas yang lebih luas.